

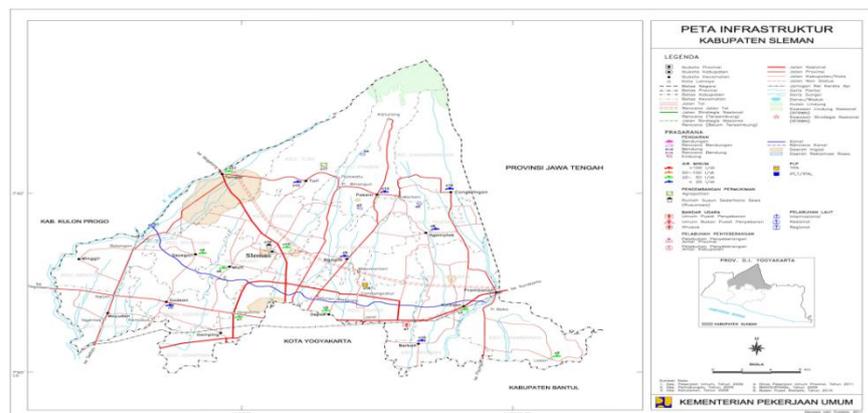
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah dan Lembaga

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Sleman sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574,82 km² atau 57.482 Ha atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km² dengan jarak terjauh timur-barat 35 km dan utara-selatan 32 km. Kabupaten Sleman secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan. (BKAD Kabupaten Sleman, 2018).

Berikut ini gambaran peta wilayah Kabupaten Sleman.



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2018

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Sleman

2. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) resmi beroperasi pada awal tahun 2017 yang merupakan gabungan antara dua instansi tahun sebelumnya yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Uraian mengenai sejarah BKAD Kabupaten Sleman dapat diketahui melalui proses kilas balik. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999, pengelolaan keuangan Pemda dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Adapun pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Bagian Perlengkapan, sedangkan instansi yang melakukan pengelolaan pendapatan dilaksanakan oleh Dipenda.

Selanjutnya pada tahun 1999, Pemerintah Pusat mencanangkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemda harus melakukan penataan dalam berbagai bidang termasuk penataan kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan daerah. Sebagai tindak lanjut otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk instansi pengelola keuangan daerah dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. BPKKD ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 12 Tahun 2000 BPKKD ini merupakan penggabungan dari Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dipenda.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan baru dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adanya Peraturan Daerah tersebut mengakibatkan adanya perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Pusat semakin memberikan keleluasaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk adanya pendelegasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Adanya penyerahan kewenangan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan baru dengan membentuk dinas baru yang dikhususkan untuk mengelola pendapatan dengan tujuan agar pengelolaan pendapatan semakin efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut menandai lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman dan Dipenda Kabupaten Sleman yang kelembagaannya berakhir sampai akhir tahun 2016.

Selanjutnya tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Adanya Perda tersebut terbentuklah BKAD yang merupakan penggabungan antara DPAKD dan Dipenda. Kelembagaan BKAD mulai resmi beroperasi pada awal Januari 2017 dengan dilantiknya pejabat struktural dan penyampaian SK Bupati mengenai pegawai BKAD. BKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Kepala BKAD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan enam (6) orang Kepala Bidang. BKAD dalam melaksanakan tugas mempunyai beberapa fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian fungsi penunjang keuangan.
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- e. Pelaksanaan sekretariat badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

a. Visi

Terwujudnya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan Keuangan.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang berkualitas.
- 3) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

- 1) Subbidang Pendaftaran
- 2) Subbidang Pendataan
- 3) Subbidang Penetapan

d. Bidang Penagihan dan Pengembangan

- 1) Subbidang Penagihan
- 2) Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
- 3) Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

e. Bidang Perbendaharaan

- 1) Subbidang Belanja Gaji
- 2) Subbidang Belanja Non Gaji

f. Bidang Anggaran

- 1) Subbidang Analisis Anggaran
- 2) Subbidang Perencanaan Anggaran
- 3) Subbidang Pengendalian Anggaran

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Subbidang Akuntansi dan Evaluasi
- 2) Subbidang Pelaporan

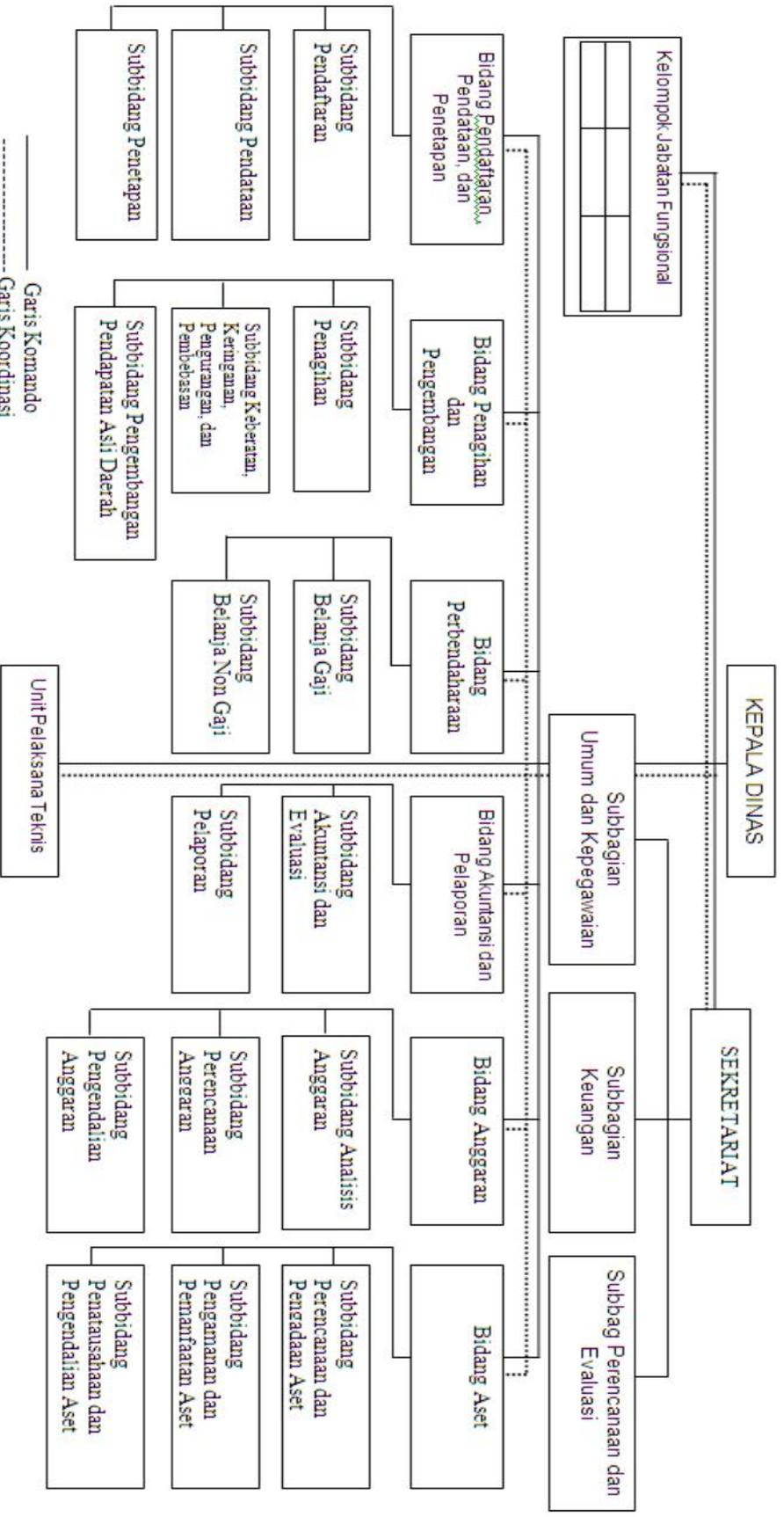
h. Bidang Aset

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
- 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
- 3) Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- 1) UPT Stadion Maguwoharjo
- 2) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal

j. Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2018

Gambar 4.2
Badan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

B. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Sleman dalam penelitian ini merupakan proses penilaian kinerja BKAD serta penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BKAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2016. Analisis yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penilaian tersebut yaitu menggunakan analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu: analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efisiensi belanja, analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemda Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016. Adapun hasil dari analisis kinerja keuangan tersebut yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan Pemda dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). (Halim, 2014: L-5).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

No	Kategori	Kemandirian	Pola Hubungan
1.	Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
2.	Rendah	25%-50%	Konsultatif
3.	Sedang	50%-75%	Partisipatif
4.	Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2007 (dalam Fitriani, 2014)

Hasil dari perhitungan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio	Keterangan
2012	301.069.539.282,13	1.281.708.216.150,00	23,49	Instruktif
2013	449.270.304.864,83	1.442.483.146.251,00	31,15	Konsultatif
2014	573.337.599.560,11	1.499.148.394.633,50	38,24	Konsultatif
2015	643.130.079.828,03	1.646.360.587.532,09	39,06	Konsultatif
2016	717.151.176.028,57	1.602.998.761.228,23	44,74	Konsultatif
Rata-Rata			35,34	Konsultatif

Sumber: Data diolah, 2018

Diketahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar 23,49% merupakan tahun terendah pada 5 tahun terakhir dan rasio tertinggi yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 44,74%. Rata-rata kemandirian dikategorikan masih kurang karena baru mencapai 35,34%. Pada tahun 2012 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman termasuk kedalam

kategori rendah sekali yaitu sebesar 23,49% dan pola hubungan Pemda dengan Pemerintah Pusat yaitu instruktif. Dimana campur tangan pemerintah pusat lebih menonjol daripada kemandirian Pemda, bahkan dapat dikatakan Pemda tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Namun setelah tahun 2012 Pemda Kabupaten Sleman terus menerus melakukan perbaikan dalam mengelola keuangan daerah. Hal tersebut terbukti dari rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman yang selalu meningkat setelah tahun 2012. Peningkatan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sleman dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah membaik dan sudah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

Faktor kemandirian keuangan daerah rendah disebabkan oleh penerimaan realisasi PAD yang belum efektif dan belum dikelola secara maksimal. Disamping itu karena tingkat ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Sleman terhadap dana ekstern masih tinggi. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas dapat dicari pertumbuhan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan rasio kemandirian daerah yaitu:

$$\frac{RKKD1 - RKKD0}{RKKD0} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD1 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun ke n

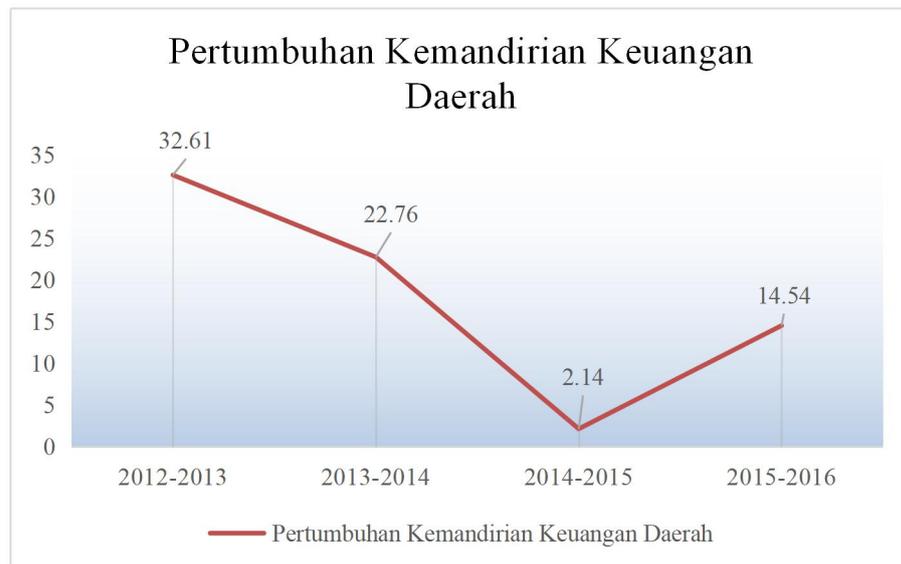
RKKD0 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya
(n-1)

Tabel 4.3
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pertumbuhan Kemandirian Keuangan Daerah
2012-2013	32,61 %
2013-2014	22,76 %
2014-2015	2,14 %
2015-2016	14,54 %
Rata-Rata	18,01%

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut Gambar Grafik pertumbuhan kemandirian keuangan Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2016.



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.3
Pertumbuhan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.3 pertumbuhan kemandirian keuangan daerah pemda Kab Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan

yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Kemandirian Keuangan Daerah Sleman meningkat tajam pada tahun 2013 yaitu mengalami kenaikan sebesar 32,61 % dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan paling rendah yaitu pada tahun 2015, hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2014 sebesar 38,24% meningkat menjadi sebesar 39,06% pada tahun 2015. Peningkatan pertumbuhan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman tidak terlalu signifikan karena hanya sebesar 2, 14%. Pemda Kabupaten Sleman harus bisa memaksimalkan lagi realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya agar pertumbuhan kemandirian keuangan daerah meningkat.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD mengukur kinerja Pemda dalam merealisasi penerimaan PAD yang telah dirancang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. (Halim, 2014: L-6).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut tabel katagori efektivitas PAD.

Tabel 4.4
Kategori Efektivitas PAD

No	Kategori	Efektivitas
1.	Tidak Efektif	<60%
2.	Kurang Efektif	60%-80%
3.	Cukup Efektif	80%-90%
4.	Efektif	90%-100%
5.	Sangat Efektif	>100%

Sumber: Mega Pratidina, 2013 (dalam Fitriani, 2014)

Hasil dari perhitungan analisis Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2012	241.003.081.720,31	301.069.539.284,13	124,92	Sangat Efektif
2013	342.895.307.197,81	449.270.304.864,83	131,02	Sangat Efektif
2014	474.917.917.941,46	573.337.599.560,11	120,72	Sangat Efektif
2015	577.585.009.141,24	643.130.079.828,03	111,35	Sangat Efektif
2016	648.841.915.155,32,1	717.151.176.028,57	110,53	Sangat Efektif
Rata-Rata			119,71	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Kabupaten Sleman dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD selama tahun 2012-2016 sudah sangat efektif. Rasio Efektivitas tertinggi pada tahun 2013 yaitu 131,02% dengan kategori sangat efektif. Rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Sleman selama tahun 2012-2016 sudah termasuk kedalam kategori sangat efektif karena sudah mencapai >100% yaitu sebesar 119,71%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Sleman dalam merealisasikan penerimaan PAD selama tahun 2012-2016 sudah baik dan mencapai target yang direncanakan. Namun, kenaikan rasio efektivitas PAD sebanding dengan meningkatnya anggaran PAD yang ditargetkan oleh Pemda Kabupaten Sleman. Jadi, sudah sewajarnya Pemda dianggap efektif dalam merealisasikan PAD.

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas PAD diatas dapat dicari pertumbuhan rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan efektivitas PAD yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{REPAD1} - \text{REPAD0}}{\text{REPAD0}} \times 100\%$$

Keterangan:

REPAD1 = Rasio Efektivitas PAD Tahun ke n

REPAD0 = Rasio Efektivitas PAD Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 4.6
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Pertumbuhan Efektivitas PAD
2012-2013	4,88%
2013-2014	-7,86%
2014-2015	-7,76%
2015-2016	-0,74%
Rata-Rata	-0,03%

Sumber: Data Diolah, 2018



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.4
Pertumbuhan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.4 Efektivitas PAD Pemda Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Efektivitas PAD pada tahun 2012-2016 cenderung stagnan dan tidak mengalami kenaikan yang berarti. Pertumbuhan terbesar yaitu pada tahun 2013 dengan mengalami kenaikan sebesar 4,88%. Setelah tahun 2013 pertumbuhan rasio efektivitas PAD justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga agar pertumbuhan rasio efektivitas PAD stabil Pemda Kabupaten Sleman sebaiknya meningkatkan penerimaan PAD dengan memperhatikan penerimaan PAD pada tahun sebelumnya.

3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD menunjukkan perbandingan besar belanja yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima. (Halim, 2014: L-7). Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Belanja yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Tabel 4.7
Kategori Efisiensi PAD

No	Kategori	Efisiensi
1.	Tidak Efisien	>100%
2.	Kurang Efisien	90%-100%
3.	Cukup Efisien	80%-90%
4.	Efisien	60%-80%
5.	Sangat Efisien	<60%

Sumber: Kepemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Pramono, 2014)

Hasil dari perhitungan analisis Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.8
Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi PAD	Keterangan
2012	1.421.401.170.875,33	301.069.539.284,13	21,18	Sangat Efisien
2013	1.693.528.297.005,79	449.270.304.864,83	26,53	Sangat Efisien
2014	1.896.477.377.488,36	573.337.599.560,11	30,23	Sangat Efisien
2015	2.328.751.919.925,33	643.130.079.828,03	27,62	Sangat Efisien
2016	2.455.446.948.874,20	717.151.176.028,57	29,21	Sangat Efisien
Rata-Rata			26,95	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah, 2018

Diketahui Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar 21,18% merupakan tahun terendah pada 5 tahun terakhir dan rasio tertinggi yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 30,23%. Rata-rata efisiensi PAD dikategorikan efisien karena telah mencapai 26,95%. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2012-2016 selalu mengalami perubahan namun tidak signifikan namun masih dalam kategori sangat efisien. Menurut perhitungan Rasio Efisiensi PAD Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan sangat efisien ketika mencapai nilai kurang dari 60%. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat jika biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sudah efisien karena realisasi PAD mencapai lebih dari 20%.

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi PAD diatas dapat dicari pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD yaitu:

Pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD

$$\frac{\text{REPAD1} - \text{REPAD0}}{\text{REPAD0}} \times 100\%$$

Keterangan:

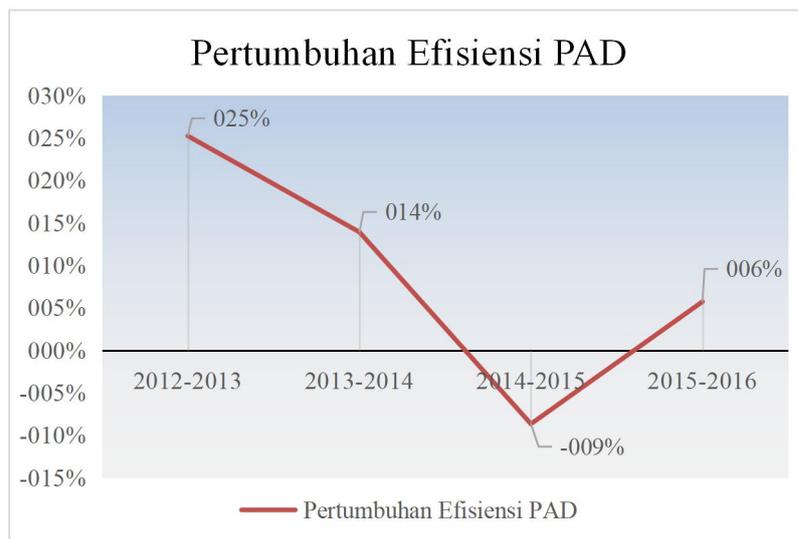
REPAD1 = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun ke n

REPAD0 = Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 4.9
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Pertumbuhan Efisiensi PAD
2012-2013	25,26%
2013-2014	13,95%
2014-2015	-8,63%
2015-2016	5,76%
Rata-Rata	0,09%

Sumber: Data diolah, 2018



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.5
Pertumbuhan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.5 Efisiensi PAD Pemda Kabupaten Sleman tahun 2006-2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Efisiensi PAD meningkat tajam pada tahun 2013 yaitu mencapai 25%. Pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan rasio efisiensi PAD mengalami penurunan. Penurunan terbesar yaitu pada tahun 2015 yaitu turun sebesar 8%.

4. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja bertujuan mengukur tingkat penghematan anggaran oleh Pemda. Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Rumus rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.10
Kategori Efisiensi Belanja Daerah

No	Kategori	Efisiensi
1.	Tidak Efisien	>100%
2.	Kurang Efisien	90%-100%
3.	Cukup Efisien	80%-90%
4.	Efisien	60%-80%
5.	Sangat Efisien	<60%

Sumber: Abdul Halim, 2007 (dalam Vendra, 2015)

Hasil dari perhitungan analisis Rasio Efisiensi Belanja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.11
Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realiasasi Belanja Daerah	Rasio	Keterangan
2012	1.595.739.879.570,00	1.421.401.170.875,33	89,07	Cukup Efisien
2013	1.946.380.363.064,13	1.693.528.297.005,79	87,01	Cukup Efisien
2014	2.288.645.856.460,56	1.896.477.377.488,36	82,86	Cukup Efisien
2015	2.770.882.731.330,03	2.328.751.919.925,33	84,04	Cukup Efisien
2016	2.647.865.812.373,38	2.455.446.948.874,20	92,73	Kurang Efisien
Rata-Rata			87,15	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Sleman dalam rangka melakukan penghematan anggaran

oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sudah cukup Efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata efisiensi belanja dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 87,15 termasuk kedalam kategori cukup efisien. Rasio efisiensi belanja tertinggi pada tahun 2016 yaitu 92,73 persen dengan kategori kurang efisien. Karena semakin tinggi hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menandakan semakin inefisiensi suatu Pemda dalam menghemat anggarannya. Atau dapat dikatakan belanja terlalu besar. Sehingga Pemda Kabupaten Sleman masih perlu menekan pengeluaran belanja daerah agar dapat dikatakan efisien dalam penghematan anggaran.

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja tersebut dapat dicari pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{REB1} - \text{REB0}}{\text{REB0}} \times 100\%$$

Keterangan:

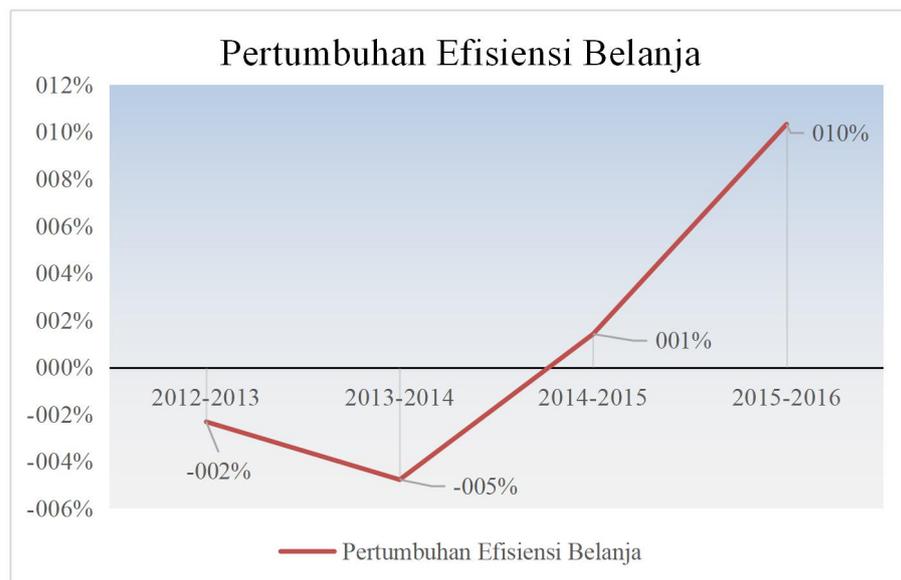
REB1 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun ke n

REB0 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 4.12
Perhitungan Pertumbuhan
Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tahun	Pertumbuhan Efisiensi Belanja
2012-2013	-2,31%
2013-2014	-4,77%
2014-2015	1,42%
2015-2016	10,34%
Rata-Rata	0,011%

Sumber: Data diolah, 2018



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.6
Pertumbuhan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.6 pertumbuhan rasio efisiensi belanja Pemda Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat Pertumbuhan Efisiensi Belanja meningkat tajam pada tahun 2016. Hal tersebut menggambarkan jika Pemda Kabupaten Sleman belum mampu melakukan penghematan anggaran karena belanja daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

5. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan Pemda dengan estimasi. Suatu daerah dianggap mempunyai kinerja yang baik jika Pemda mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.

Hasil dari perhitungan analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.13
Perhitungan Rasio Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan
Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

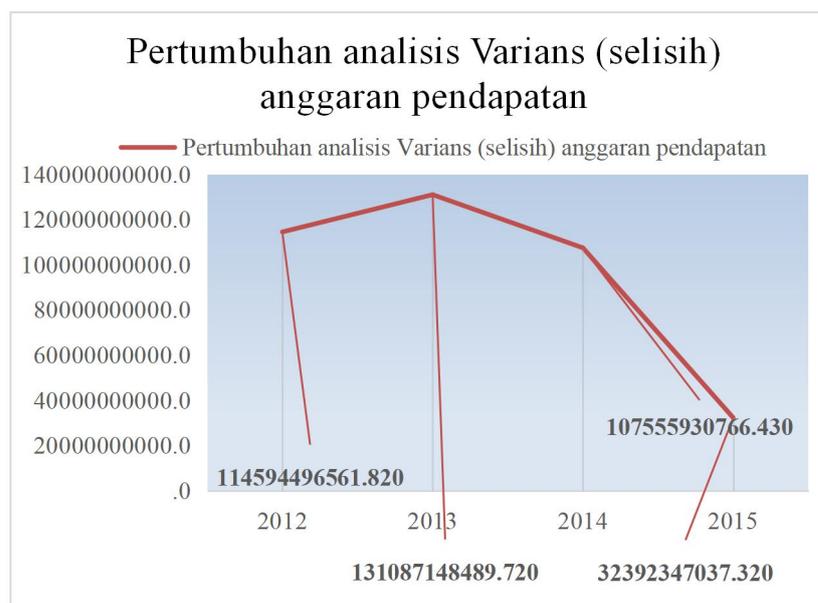
Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisaasi Pendapatan Daerah	Rasio
2012	1.475.128.477.847,31	1.589.722.974.409,13	114.594.496.561,82
2013	1.768.438.488.349,11	1.899.525.636.838,83	131.087.148.489,72
2014	1.969.264.200.317,70	2.076.820.131.084,13	107.555.930.766,43
2015	2.262.230.417.718,80	2.294.622.764.756,12	32.392.347.037,32
2016	2.183.747.824.232,36	2.329.097.456.006,80	145.349.631.774,44
Rata-Rata	1.931.761.881.693,06	2.037.957.792.619,00	106.195.910.925,95

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa rasio analisis varians (selisih) anggaran pendapatan Kabupaten Sleman dari tahun 2012-2016 selalu

ada perubahan selisih lebih. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Sleman sudah dianggap baik karena Pemda mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Selisih lebih terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 145.349.631.774,44.

Dari hasil perhitungan Rasio analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan diatas dapat dilihat pertumbuhan selisih analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan Kabupaten Sleman. Berikut gambar grafik pertumbuhan selisih anggaran pendapatan Pemda Kabupaten Sleman.



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.7
Pertumbuhan Rasio Analisis Varians (selisih)
Anggaran Pendapatan Kabupaten Sleman

6. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi (DD) menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Rumus DD adalah: } DD = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut tabel kriteria penilaian tingkat derajat desentralisasi.

Tabel 4.14
Kategori Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

No	Derajat Desentralisasi	Kategori
1.	Sangat Baik	>50,00%
2.	Baik	40,01-50,00%
3.	Sedang	30,01-40,00%
4.	Cukup	20,01-30,00%
5.	Kurang	10,01-20,00%
6.	Sangat Kurang	0-10,00 %

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Wahyu, 2015)

Tabel 4.15
Perhitungan Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Kabupaten Sleman

Tahun	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Rasio Derajat Desentralisasi	Keterangan
2012	1.589.722.974.409,13	301.069.539.284,13	18,94	Kurang
2013	1.899.525.636.838,83	449.270.304.864,83	23,65	Cukup
2014	2.076.820.131.084,13	573.337.599.560,11	27,61	Cukup
2015	2.294.622.764.756,12	643.130.079.828,03	28,03	Cukup
2016	2.329.097.456.006,80	717.151.176.028,57	30,79	Sedang
Rata-Rata			25,80	Cukup

Sumber: Data diolah, 2018

Diketahui Derajat Desentralisasi Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar 18,94% merupakan tahun terendah pada 5 tahun terakhir dan rasio tertinggi yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 30,79%. Rata-rata Derajat Desentralisasi dikategorikan cukup karena telah mencapai 25,80%. Menurut perhitungan Derajat Desentralisasi, Pemda Kabupaten Sleman dapat dikatakan mengalami peningkatan dalam penyelenggarakan desentralisasi. Hal tersebut terlihat dari rasio derajat desentralisasi yang dari tahun ke tahun meningkat dari kategori kurang hingga mencapai kategori sedang. Disamping itu berarti penerimaan PAD Pemda Kabupaten Sleman telah mampu berkontribusi terhadap total penerimaan daerah tiap tahunnya. Namun masih perlu dilakukan peningkatan karena rata-rata dalam lima tahun terakhir masih dalam katagori cukup.

Dari hasil perhitungan Derajat Desentralisasi diatas dapat dicari pertumbuhan Derajat Desentralisasi Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan Derajat Desentralisasi

$$\text{yaitu: Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan DD} = \frac{\text{DD1} - \text{DD0}}{\text{DD0}} \times 100\%$$

Keterangan:

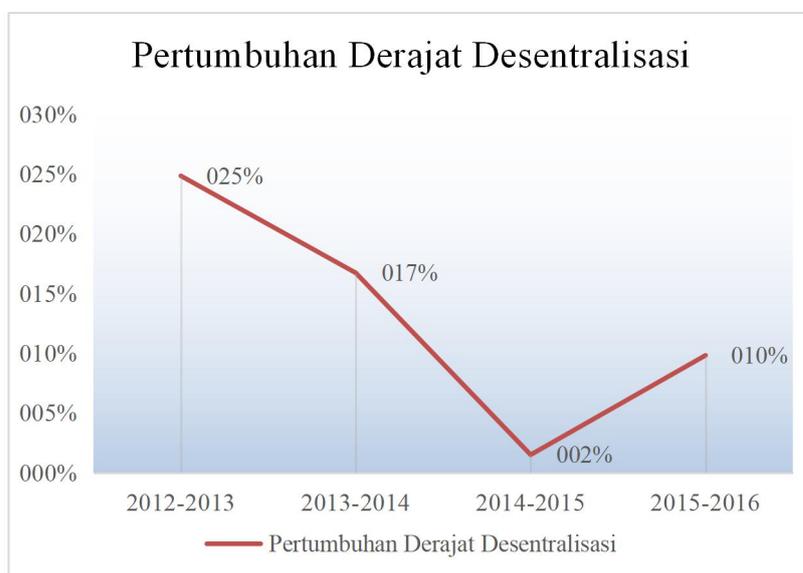
DD1 = Derajat Desentralisasi Tahun ke n

DD0 = Derajat Desentralisasi Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 4.16
Pertumbuhan Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi
Kabupaten Sleman

Tahun	Pertumbuhan Derajat Desentralisasi
2012-2013	24,86%
2013-2014	16,74%
2014-2015	1,52%
2015-2016	9,84%
Rata-Rata	0,13%

Sumber: Data diolah, 2018



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.8
Pertumbuhan Derajat Desentralisasi Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.8 Derajat Desentralisasi Pemda Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Derajat Desentralisasi meningkat tajam pada tahun 2013 yaitu sebesar 25%. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih perlu meningkatkan pertumbuhan

derajat desentralisasi dengan meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Sleman setiap tahunnya.

7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat. Rumus rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total PD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat.

Tabel 4.17
Kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Kategori	Ketergantungan Keuangan Daerah
1.	Sangat Rendah	0%-10,00%
2.	Rendah	10,01%-20,00%
3.	Sedang	20,01%-30,00%
4.	Cukup	30,01%-40,00%
5.	Tinggi	40,01%-50,00%
6.	Sangat Tinggi	>50,00%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Wahyu, 2015)

Hasil dari perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.18
Perhitungan Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio	Keterangan
2012	1.589.722.974.409,13	1.281.708.216.150,00	80,62	Sangat Tinggi
2013	1.899.525.636.838,83	1.442.483.146.251,00	75,94	Sangat Tinggi
2014	2.076.820.131.084,13	1.499.148.394.633,50	72,18	Sangat Tinggi
2015	2.294.622.764.756,12	1.646.360.587.532,09	71,75	Sangat Tinggi
2016	2.329.097.456.006,80	1.602.998.761.228,23	68,82	Sangat Tinggi
Rata-Rata			73,86	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah, 2018

Diketahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 yaitu sebesar 80,62% merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada 5 tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 68,82%. Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi karena mencapai 73,86%. Menurut perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tersebut, Pemda Kabupaten Sleman dapat dikatakan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Total Pendapatan Daerah masih banyak yang berasal dari pendapatan transfer. Hal tersebut menandakan bahwa Pemda Kabupaten Sleman belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah.

Dari hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diatas dapat dicari pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yaitu:

Pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\frac{R1 - R0}{R0} \times 100\%$$

Keterangan:

R1 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun ke n

R0 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 4.19
Perhitungan Pertumbuhan Rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2012-2013	5,81%
2013-2014	-4,95%
2014-2015	-0,59%
2015-2016	-4,08%
Rata-Rata	-1,16%

Sumber: Data diolah, 2018

Dari perhitungan Tabel 4.20 dapat diperoleh grafik Pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.9
Pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.9 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemda Kabupaten Sleman tahun 2006-2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif (berubah-ubah). Tingkat Pertumbuhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah meningkat tajam pada tahun 2013. Pertumbuhan rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan artinya Pemda sudah mulai tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan daerah.

8. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Pemda dalam menyelenggarakan otonomi daerah disamping mengandalkan PAD, Pemda dapat menggunakan alternatif sumber dana lain. Sumber dana lain bisa berasal dari pinjaman yang dilakukan

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku (Halim, 2014: L-10).

Rumus DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan:

DSCR	=	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
BD	=	Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan lainnya
DAU	=	Dana Alokasi Umum
BW	=	Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemda. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.
Pokok Angsuran	=	Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun angsuran yang bersangkutan
Bunga	=	Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

Biaya Lainnya = Biaya lainnya (biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, denda)

Syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang adalah DSCR paling sedikit 2,5. Hasil dari perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.20
Perhitungan DSCR BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

Keterangan	2012 (Ribuan)	2013 (Ribuan)	2014 (Ribuan)	2015 (Ribuan)	2016 (Ribuan)
PAD	301.069.539	449.270.304	573.337.599	643.130.079	717.151.176
DHB	211.375.515	184.821.149	210.865.585	79.383.739	110.089.918
Belanja Wajib	979.253.621	1.034.255.811	1.110.060.035	1.197.522.434	1.263.367.532
Bunga	45.273	28.750	12.341	258.765	3.021.102
Pokok Angsuran	137.744	137.744	137.744	0	7.020.000
Rasio DSCR	179710,1909	295161,1193	417260,653	196858,9245	5758,17467

Sumber: Data diolah, 2018

DSCR mengindikasikan kelayakan Pemda untuk melakukan pinjaman. DSCR ditetapkan minimal 2,5% sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201 tentang Pinjaman Daerah. Dari Tabel. 4,21 dapat dilihat bahwa Kabupaten Sleman telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga layak apabila akan melakukan pinjaman baik jangka pendek ataupun panjang saat terjadi defisit anggaran.

Dari hasil perhitungan DSCR diatas dapat dicari pertumbuhan DSCR Kabupaten Sleman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan DSCR yaitu:

$$\text{Pertumbuhan DSCR} = \frac{\text{DSCR1} - \text{DSCR0}}{\text{DSCR0}} \times 100\%$$

Keterangan:

DSCR1 = DSCR Tahun ke n

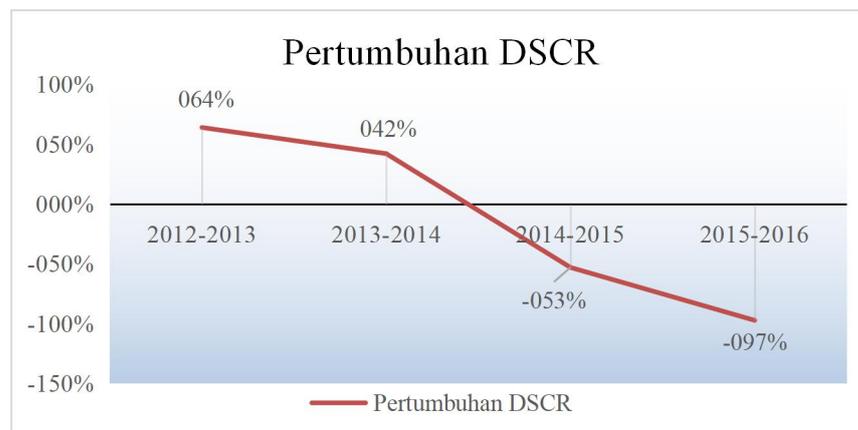
DSCR0 = DSCR Tahun Sebelumnya (n-1)

Tabel 4.21
Perhitungan Pertumbuhan DSCR
Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

Tahun	Pertumbuhan DSCR
2012-2013	64,24%
2013-2014	41,37%
2014-2015	-52,82%
2015-2016	-97,07%
Rata-Rata	-11,07%

Sumber: Data diolah, 2018

Dari perhitungan Tabel 4.22 dapat diperoleh grafik berikut:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.10
Pertumbuhan DSCR Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.10 DSCR Pemda Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 mengalami Penurunan. Artinya Pemda Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun dianggap masih layak apabila akan melakukan pinjaman baik jangka pendek ataupun panjang saat terjadi defisit anggaran. Hal tersebut karena DSCR tahun 2012 sebesar 179.710,190 pada tahun 2013 meningkat sebesar 64% diikuti peningkatan pula pada tahun-tahun berikutnya.

9. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menggambarkan kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. (Halim, 2014: L-12).

Rumus Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

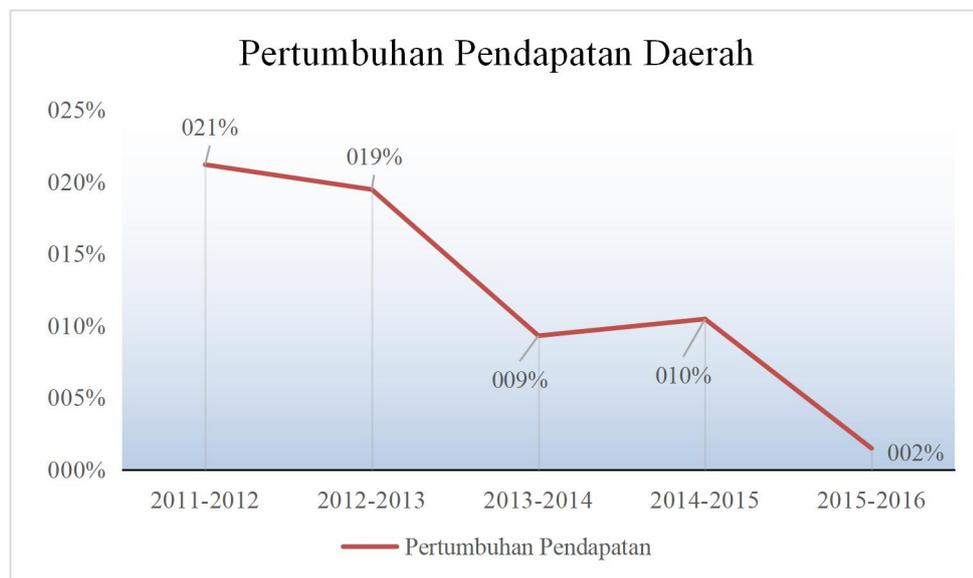
a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 4.22
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya	Rasio
2011-2012	1.589.722.974.409,13	1.311.473.547.855,47	21,22
2012-2013	1.899.525.636.838,83	1.589.722.974.409,13	19,49
2013-2014	2.076.820.131.084,13	1.899.525.636.838,83	9,33
2014-2015	2.294.622.764.756,12	2.076.820.131.084,13	10,49
2015-2016	2.329.097.456.006,80	2.294.622.764.756,12	1,50
Rata-Rata			12,41

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut gambar grafik pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sleman:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.11
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

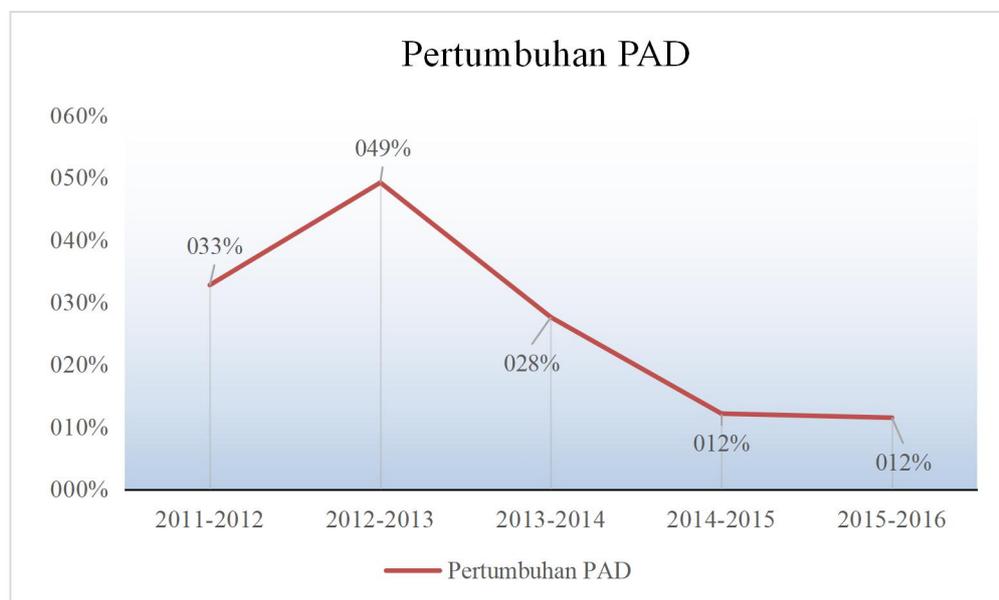
b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.23
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman

Tahun	PAD	PAD Tahun Sebelumnya	Rasio
2011-2012	301.069.539.284,13	226.723.271.088,47	32,79
2012-2013	449.270.304.864,83	301.069.539.284,13	49,22
2013-2014	573.337.599.560,11	449.270.304.864,83	27,62
2014-2015	643.130.079.828,03	573.337.599.560,11	12,17
2015-2016	717.151.176.028,57	643.130.079.828,03	11,51
Rata-Rata			26,66

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut gambar grafik pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.12
Pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Tabel 4.24
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Belanja Modal	Belanja Modal Tahun Sebelumnya	Rasio
2011-2012	132.536.252.044,00	96.111.399.134,72	37,90
2012-2013	206.859.865.136,17	132.536.252.044,00	56,08
2013-2014	282.862.049.259,00	206.859.865.136,17	36,74
2014-2015	426.782.827.408,85	282.862.049.259,00	50,88
2015-2016	344.002.326.231,33	426.782.827.408,85	(19,40)
Rata-Rata			32,44

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut gambar grafik pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Sleman:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.13
Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten Sleman

d. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional

Tabel 4.25
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional
Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Belanja Operasional	Belanja Operasional Tahun Sebelumnya	Rasio
2011-2012	1.241.689.260.072,05	1.142.118.624.078,58	8,72
2012-2013	1.420.339.683.204,62	1.241.689.260.072,05	14,39
2013-2014	1.792.142.435.143,27	1.420.339.683.204,62	26,18
2014-2015	1.726.852.579.468,64	1.792.142.435.143,27	(3,64)
2015-2016	1.900.585.606.945,67	1.726.852.579.468,64	10,06
Rata-Rata			247,78

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut gambar grafik pertumbuhan Belanja Operasional Kabupaten Sleman:



Sumber: Data diolah, 2018

Gambar 4.14
Pertumbuhan Belanja Operasional Kabupaten Sleman

Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah dan PAD BKAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya, Pemda Kabupaten Sleman telah dapat dikatakan mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah naik seiring dengan PAD yang naik dari tahun ke tahun. Sedangkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah BKAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 fluktuatif. Dari tahun 2012-2014 pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,13% menjadi 10,49%, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 1,5%. Rata-Rata kenaikan Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu sebesar 12,41%.

PAD Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya tidak signifikan. Tahun 2012 PAD Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebesar 32,79% lalu pada tahun 2013 naik menjadi 49,22%. Namun dari tahun 2014-2016 diketahui pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Untuk itu Pemda Kabupaten Sleman perlu mengoptimalkan lagi penerimaan PAD agar pertumbuhannya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selain pendapatan, pertumbuhan belanja modal Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 fluktuatif. Pertumbuhan terkecil

yaitu pada tahun 2016 hingga mencapai -19,40%. Pergerakan pertumbuhan yang menurun tersebut terjadi seiring dengan anggaran belanja modal yang berkurang dan karena BKAD Kabupaten Sleman belum mampu merealisasikan pos belanja modal secara maksimal, meliputi: (1) belanja tanah; (2) belanja peralatan dan mesin; (3) belanja gedung dan pembangunan; (4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja aset lainnya. Hal tersebut terlihat pada laporan realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016.

Pertumbuhan belanja operasional Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012-2016 yaitu fluktuatif dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2015 biaya operasional Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang sangat pesat yaitu sebesar 3,64% atau anjlok sebesar 29,83% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu mencapai 13,7% sehingga menjadi 10,06%.